

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem global maupun regional. Menurut UU No. 41 Tahun 1999, hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon (*carbon sink*), pengatur tata air, pelindung keanekaragaman hayati, serta penyangga kehidupan berbagai spesies flora dan fauna. Hutan juga memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi karena menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang hidup di dalam maupun di sekitar kawasan hutan (Siregar *et al* 2018).

Secara global, hutan tropis menjadi perhatian utama karena kontribusinya terhadap stabilitas iklim dunia. Berbagai laporan menunjukkan bahwa laju deforestasi dan degradasi hutan masih menjadi permasalahan serius di banyak negara berkembang. Aktivitas seperti pembukaan lahan untuk pertanian, pertambangan, pembangunan infrastruktur, serta eksploitasi sumber daya hutan yang tidak berkelanjutan menjadi penyebab utama berkurangnya tutupan hutan. (Wirawan & Amrifo 2021)

Fenomena tersebut juga tercermin pada konteks nasional Indonesia sebagai salah satu negara dengan luas hutan tropis terbesar di dunia. Tekanan terhadap hutan akibat berbagai aktivitas pemanfaatan lahan menunjukkan bahwa Indonesia tidak terlepas dari dinamika global terkait deforestasi dan degradasi hutan. Oleh karena itu, pemantauan kondisi hutan secara berkala menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana perubahan tutupan hutan serta efektivitas upaya pengelolaannya. Dalam konteks inilah, data dan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan menjadi dasar penting untuk memahami kondisi aktual hutan Indonesia.

Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Kehutanan, kondisi hutan Indonesia pada tahun 2024 masih menunjukkan peran yang sangat penting, dengan luas tutupan hutan mencapai 95,5 juta hektare atau sekitar 51,1% dari total daratan Indonesia, di mana 87,8 juta hektare (91,9%) berada di dalam kawasan hutan. Namun demikian, tekanan terhadap hutan tetap terlihat dari angka deforestasi netto sebesar 175,4 ribu hektare, yang berasal dari deforestasi bruto 216,2 ribu hektare dan hanya mampu dikurangi oleh reforestasi sebesar 40,8 ribu hektare. Fakta bahwa 92,8% deforestasi bruto (200,6 ribu hektare) terjadi di hutan sekunder, dengan 69,3% berada di dalam kawasan hutan, menunjukkan bahwa ekosistem hutan masih rentan terhadap berbagai aktivitas yang menyebabkan degradasi.

Di sisi lain, upaya pemerintah dalam menekan laju deforestasi terus dilakukan melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang pada tahun 2024 mencapai 217,9 ribu hektare, terdiri dari 71,3 ribu hektare di dalam kawasan hutan dan 146,6 ribu hektare di luar kawasan hutan. Capaian ini bahkan mendekati rata-rata rehabilitasi dalam satu dekade terakhir yang mencapai sekitar 230 ribu hektare per tahun, sehingga memberikan kontribusi nyata dalam menambah tutupan hutan, baik berupa hutan sekunder maupun sistem agroforestry. Meskipun demikian, adanya sedikit kenaikan tren deforestasi dibanding tahun sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas program rehabilitasi masih perlu ditingkatkan agar mampu mengimbangi laju kehilangan hutan (Wibowo et al., 2022; KLHK, 2025).

Berbagai langkah strategis seperti pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pembatasan izin baru, pengelolaan hutan lestari, hingga penegakan hukum kehutanan perlu terus diperkuat secara konsisten. Upaya ini menjadi semakin penting mengingat target Indonesia dalam program FOLU Net Sink 2030, yang menuntut keseimbangan antara emisi dan serapan karbon. Dengan mempertimbangkan data luas hutan, angka deforestasi, serta capaian rehabilitasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas lingkungan sekaligus memenuhi komitmen penurunan emisi karbon di masa depan.

Indonesia juga menghadapi berbagai permasalahan kehutanan yang kompleks. Deforestasi dan degradasi hutan masih terjadi akibat tekanan ekonomi, pertumbuhan penduduk, serta lemahnya tata kelola hutan. Selain itu, konversi lahan menjadi perkebunan, pertanian, dan pemukiman turut mempercepat berkurangnya luas hutan. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya hutan.

Keterkaitan yang sangat erat antara masyarakat lokal dengan kawasan hutan. Hutan telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sejak lama, baik sebagai sumber pangan, energi, maupun pendapatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2009), sekitar 48,8 juta penduduk Indonesia tinggal di sekitar kawasan hutan dan sekitar 10,2 juta di antaranya tergolong miskin. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan, dimana wilayah yang kaya akan sumber daya alam justru dihuni oleh masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang relatif rendah. Selain itu, data lain menunjukkan bahwa terdapat puluhan ribu desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Sebagian besar masyarakat tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya hutan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini menyebabkan tekanan terhadap hutan semakin meningkat, terutama ketika kebutuhan ekonomi masyarakat tidak diimbangi dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (Maryudi, 2015).

Permasalahan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan seringkali menjadi faktor pendorong terjadinya kerusakan hutan. Tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi menyebabkan masyarakat melakukan aktivitas seperti perambahan hutan, penebangan liar, dan alih fungsi lahan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kehutanan tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan pengelolaan hutan yang tidak hanya berorientasi pada aspek konservasi, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Community-Based Forest Management/CBFM) atau perhutanan sosial (Maryudi et al., 2022)

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan suatu sistem pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan akses legal kepada masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Menurut Tangkasiang dan Regita (2026), perhutanan sosial merupakan pendekatan yang dirancang untuk mengalihkan pengelolaan hutan dari model yang didominasi oleh negara dan korporasi menuju model yang melibatkan komunitas lokal sebagai pengelola utama, dengan tujuan meningkatkan konservasi dan kesejahteraan masyarakat secara simultan. Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep Asset Based Community Development (ABCD) yang menekankan pada pemanfaatan potensi atau aset yang dimiliki oleh masyarakat. Rubin (2000) dan Green (2002) menyatakan bahwa

pengembangan masyarakat berbasis aset mencakup pemanfaatan kapital manusia, sosial, fisik, finansial, dan lingkungan sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, di Indonesia telah diterapkan berbagai skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat sekitar hutan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi PHBM mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta pemanfaatan aset lokal dalam pengelolaan hutan. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya partisipasi aktif masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan (Utami, 2015). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepastian hak kelola, modal sosial, dukungan kelembagaan, serta pendampingan teknis. Sebaliknya, tekanan eksternal seperti konversi lahan, aktivitas pertambangan, dan konflik kepentingan menjadi hambatan utama dalam implementasinya (Tangkasiang & Regita, 2026).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam terbukti memberikan dampak positif. Studi mengenai ekowisata berbasis masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan (Dumumpe et al., 2025). Berbagai penelitian yang ada masih bersifat parsial dan berfokus pada studi kasus tertentu, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara keseluruhan. Terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara sistematis berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan guna mengidentifikasi pola, tren, faktor keberhasilan, serta tantangan dalam implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai penelitian yang relevan terkait pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif, objektif, dan sistematis terhadap perkembangan penelitian dalam bidang tersebut.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep, implementasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan

dalam pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Penelitian ini memiliki kontribusi penting baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kehutanan, khususnya terkait pengelolaan hutan berbasis masyarakat, serta dalam mendukung upaya pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan perkembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat?
3. Bagaimana tantangan serta implikasi kebijakan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji konsep dan pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
3. Mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala dalam implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam, terutama terkait konsep dan implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan metode Systematic Literature Review.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- a. Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan hutan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.
- b. Masyarakat, sebagai sumber pengetahuan dalam mengelola hutan secara optimal dan berkelanjutan.
- c. Lembaga terkait (LSM, akademisi, dan praktisi), sebagai acuan dalam pengembangan program pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan literatur tambahan bagi mahasiswa dan peneliti dalam mengkaji topik pengelolaan hutan berbasis masyarakat, serta memperkaya kajian ilmiah yang menggunakan pendekatan Systematic Literature Review.

